



**KETUA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

## **“MENATA MASA DEPAN INDONESIA”**

Disampaikan Pada Seminar Nasional dan Musyawarah Wilayah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) DKI Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2011

### **Yang Saya Hormati,**

- Sekjen PBNU, KH.Marsudi Syukur,
- Direktur Pusat Pengkajian Internasional Lemhanas RI ,
- Wakil Bupati Sorulangun Jambi dan Bupati Kutai Kartanegara
- Pengurus Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia,
- Panitia Seminar Nasional dan Musyawarah Wilayah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia DKI Jakarta,
- Para Pembicara Seminar,
- Hadirin Yang Berbahagia,

### **Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Suatu kehormatan bagi saya bahwa pagi hari ini, kita dapat bersama-sama hadir dalam Musyawarah Wilayah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia DKI Jakarta. Untuk itu, marilah terlebih dahulu kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya yang diberikan kepada kita sekalian.

Dalam pemahaman saya, istilah **Melayu atau Malayu** berasal dari Kerajaan Malayu, sebuah kerajaan Hindu-Budha pada abad ke-7 di hulu sungai Batanghari, Jambi di Pulau Sumatera. Secara geografis, Malayu semula hanya mengacu pada wilayah Kerajaan Malayu, namun dalam perkembangannya pemakaian istilah Melayu mencakup wilayah yang lebih luas. Yaitu negeri-negeri di pulau Sumatera, sehingga pulau tersebut disebut juga **Bumi Melayu** seperti disebutkan dalam Kakawin Nagarakertagama.

### **Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Topik yang diberikan Panitia Seminar kepada saya adalah mengenai **Menata Masa Depan Indonesia**, yang bila dilihat dari perspektif kebudayaan Indonesia, adat dan budaya Melayu tidak dapat dibicarakan sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi selalu dalam kaitan budaya Indonesia secara keseluruhan. Pemahaman terhadap Kebudayaan Indonesia adalah penting, karena masalah kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya.

Identitas budaya merupakan suatu perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antar sesama manusia, serta antara manusia dan alam semesta. Hubungan ini terus mengalami perubahan tata nilai akibat adanya interaksi antar budaya dan bangsa dan arus globalisasi yang makin kompleks.

Keberadaan etnis Melayu di Indonesia, dapat dilacak di beberapa kantong geografis, seperti daerah-daerah pantai Pulau Kalimantan, Larantuka di Pulau Flores, Makassar, Palembang, Deli-Sumatra Utara, serta di Riau, baik Riau Daratan ataupun Riau Kepulauan. Kelompok Melayu menjadi salah satu kelompok etnis minoritas, disamping berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus kelompok etnis lainnya. Sumbangan etnis Melayu yang paling nyata adalah **bahasa**, yang merupakan suatu kompleks kata, bunyi, dan ungkapan yang merujuk pada sebuah falsafah hidup dan mengatur hidup bangsa Indonesia.

Kerajaan Riau-Lingga adalah daerah yang paling murni menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan dalam bentuk tertulis di Riau, yang berdampingan dengan Johor, dianggap dasar yang pantas untuk dijadikan bahasa Melayu baku yang diberlakukan didalam sistem pendidikan di seluruh jajahan Kolonial. Peneliti Kolonial Belanda, seperti Von de Wall, Klinkert, Van Ophuijsen, dikirim ke Riau untuk mencatat bahasa itu ke dalam kamus dan tata bahasa, dengan bantuan narasumber cendekiawan pribumi, seperti Raja Ali Haji, Haji Ibrahim, dan Raja Bih. Hasil pencatatan dibawa ke Betawi, tempat ragam bahasa itu diolah, ditambah, dicampur dengan bahasa-bahasa lain, diintelektualisasi agar dapat menerima serta menyalurkan ilmu modern dari pihak Kolonial.

Pada akhirnya, momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lahir, dengan mengkonstruksi **bahasa** sebagai **Bahasa**

**Indonesia** atas dasar bahasa Melayu yang diberi semangat baru agar sesuai dengan upaya membangun negara baru dan menyalurkan semangat para pemuda dalam perang melawan Kolonial.

### **Hadirin yang berbahagia,**

Persoalan kebudayaan adalah persoalan kehidupan masyarakat, yang memiliki hubungan-hubungan tertentu, yang sering disebut sebagai struktur masyarakat (struktur sosial). Hubungan budaya dengan struktur, sampai sekarang masih menjadi polemik, apakah budaya bagian dari struktur, entitas yang terpisah, atau bahkan kebudayaanlah yang membentuk struktur sosial.

Tidak sedikit para budayawan mengkritik, bahwa tersubordinasinya kebudayaan ke dalam struktur menyebabkan budaya dipakai sebagai alat untuk menunjang struktur sosial yang telah ditetapkan oleh suatu *grand design* politik tertentu. Hal ini menyebabkan kebudayaan tidak saja kehilangan otonominya, melainkan juga telah dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga menjadi sekadar alat legitimasi politik. Kata-kata transformasi struktural ataupun **transformasi budaya** agaknya memang menjadi tema pokok para pengemuka gagasan. Mereka ingin mengarahkan manusia atau masyarakat, masuk kedalam suatu keadaan yang memungkinkan terjadinya keadilan sosial atau perdamaian manusia.

Bagaimana polemik itu berlangsung, jika dikaitkan dengan masa depan Indonesia, menurut hemat saya, **revitalisasi, reaktualisasi nilai budaya, dan pranata sosial kemasyarakatan**, merupakan upaya yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, **pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional** diarahkan untuk **mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa**, melalui antara lain:

1. mengaktualisasikan nilai-nilai budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global;
2. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa; serta
3. mendorong kerja sama yang sinergis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya.

**Hadirin yang saya berbahagia, bagaimana pemahaman kebudayaan yang telah berlangsung selama ini?**

Kebudayaan “nasional Indonesia” adalah kata sifat sekaligus menjadi pembatas dan pembeda yang bermakna, *pertama*, kebudayaan yang khas Indonesia, unik dan tidak sama dengan yang lain, *kedua*, ada suatu suasana kebudayaan menjadikan penduduk Indonesia berada dalam suasana saling memahami,

mengerti, serta merasa terikat pada struktur alam perasaaan dan pikiran yang relatif sejalan.

Dalam Kongres Kebudayaan tahun 1992, setidaknya bisa ditemukan **empat pemahaman tentang kebudayaan**. *Pertama*, kebudayaan sebagai "warisan luhur nenek moyang", *kedua*, sebagai kenyataan antropologis (yang bersifat serba menyeluruh), *ketiga*, kebudayaan sebagai "kreativitas kehidupan yang estetik", dan *keempat* kebudayaan sebagai sistem makna (*system of meaning*).

Pemahaman kebudayaan sebagai "warisan nenek moyang" hanya bisa berlaku pada kesatuan-kesatuan etnis saja, bersifat multi-warisan nenek moyang, bukan pada bangsa yang sifatnya "multi-etnis". Hanya kata-kata slogan atau mitos, yang mengatakan bangsa Indonesia mempunyai nenek moyang yang sama. Jadi pemahaman kebudayaan "sebagai warisan nenek moyang" lebih baik dipakai oleh para *literati daerah* saja. Hal ini tentu saja bisa dibenarkan secara kontitusional, agar keprihatinan kultural daerah mendapat tempat yang wajar dalam kebijaksanaan nasional.

Kebudayaan nasional Indonesia adalah "puncak-puncak kebudayaan daerah," yaitu unsur-unsur kebudayaan daerah yang berhasil masuk kedalam dan diterima sebagai bagian dari sistem makna "nasional", yang bersifat multi-daerah dan multi-etnis. Secara simbolik, hal ini dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di samping menyatakan bertanah air satu dan

berbangsa satu serta menjunjung bahasa persatuan, yang sesungguhnya merupakan bahasa utama daerah tertentu, tetapi juga mengatakan kesediaan menerima unsur-unsur daerah dalam suasana "komunitas" yang baru dibentuk yang bernama "bangsa Indonesia".

Jadi "bangsa Indonesia" adalah suatu suasana kebudayaan yang bersifat supra-etnis dan multi-etnis. Pergerakan kebangsaan, dengan kehadiran berbagai organisasi sosial-politik serta organisasi yang bersifat supra-etnis, dan berbagai corak aktivitas kebudayaan, yang melandaskan diri pada usaha pembentukan suatu suasana "nasional" dengan mengaburkan batas-batas daerah, akhirnya berhasil menciptakan suasana kebudayaan yang bersifat "nasional".

Oleh karena itu, kebudayaan nasional merupakan hasil sumbangan daerah dalam proses pembentukan dan pertumbuhan komunitas-bangsa. Sehingga, **penghormatan** dan **pemeliharaan kebudayaan daerah** adalah **pemeliharaan salah satu sumber dinamika kebudayaan nasional.**

### **Hadirin yang berbahagia, bagaimana menata masa depan Indonesia?**

Cita-cita reformasi untuk membangun "Indonesia Baru" harus dilakukan dengan cara **membangun sebuah masyarakat sipil yang demokratis,** dengan penegakkan hukum untuk

supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan.

Bangunan Indonesia Baru itu menurut Prof. Parsudi Suparlan adalah sebuah **"masyarakat multikultural Indonesia"** yang dibangun dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak **"masyarakat majemuk"**. Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang *bhinneka tunggal ika* **bukan lagi keanekaragaman suku dengan kebudayaannya, tetapi keanekaragaman kebudayaan** yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam model multikulturalisme ini, masyarakat Indonesia dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum yang coraknya seperti sebuah mosaik, tidak ada yang disebut minoritas.

Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".

Multikulturalisme menekankan **keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan**, juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, seperti politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja



dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Sebagai ideologi, multikulturalisme harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada, dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat.

### **Saudara-saudara sekalian,**

Saya ingin mengutip Pidato Kenegaraan Presiden di depan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 14 Agustus 2009 yang saya nilai masih relevan, sebagai tambahan penjelasan dari hal-hal yang telah saya uraikan sebelumnya.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan, bahwa 30-50 tahun ke depan di abad ke-21 ini, kita yakin Indonesia akan menjadi negara yang maju, bermartabat dan sejahtera. Indonesia seperti itu akan dapat diwujudkan jika Indonesia dapat memperkokoh tiga pilar kehidupan bernegara, yaitu: [1] kemandirian, [2] daya Saing dan [3] peradaban yang unggul.

*Pilar kemandirian* harus dijaga dan diperkuat, karena kemandirian adalah dasar dari kekuatan, ketahanan, dan

kemampuan kita untuk terus maju sebagai bangsa. Indonesia tidak boleh memiliki ketergantungan yang tinggi kepada negara lain, bahkan kepada dunia. Makin ke depan, dengan sumberdaya dan kekuatan budaya yang kita miliki, kemandirian sebagai bangsa, perlu terus kita tingkatkan. Indonesia harus bisa menjadi bangsa yang dapat menyediakan sendiri sebagian besar kebutuhan dasarnya. Bangsa yang tidak didikte, baik secara politik, ekonomi, maupun militer oleh negara manapun.

*Pilar kedua*, adalah daya saing yang makin tinggi, yang harus dimiliki. Dalam era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan tantangan ini, bangsa yang menang dan unggul adalah bangsa yang produktif dan inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas mengambil peluang, serta berani menghadapi perubahan.

*Pilar ketiga* adalah peradaban yang unggul. Indonesia harus mampu membangun dan memiliki peradaban bangsa yang unggul dan mulia. Itulah sebabnya, bangsa Indonesia perlu terus **mempertahankan nilai, jati diri dan karakter bangsa** kita yang luhur dan terhormat.

Untuk itu, bangsa Indonesia memerlukan pikiran-pikiran besar serta karya-karya bangsa yang besar. Dalam menatap masa depan, adalah suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk terus membangun budaya unggul (*culture of excellence*) dan peradaban yang mulia. Dari hal inilah dikembangkan karakter,

semangat, dan keuletan bangsa kita, menuju pembentukan masyarakat madani.

Kita perlu terus meningkatkan semangat dan etos kerja sebagai bangsa yang kuat dan gigih. Kita perlu terus membangun peradaban yang menghadirkan persaudaraan dan kerukunan bangsa, serta memelihara kelestarian alam. Dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, kita dituntut untuk selalu mengedepankan cara-cara yang damai, beradab dan demokratis, sebagai ciri masyarakat madani, bukan dengan cara-cara kekerasan dan mengabaikan pranata sosial dan pranata hukum.

### **Hadirin yang berbahagia,**

Dengan memahami prinsip-prinsip itulah, kita akan juga dapat memahami masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam Kitab Suci disebut semangat *rabbaniyah*. Inilah *hablum min-Allah*, tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista.

Semangat *rabbaniyah* itu, akan memancar dalam semangat perikemanusiaan, yaitu semangat *insaniyah* atau *basyariyah*, dimensi horisontal hidup manusia, *hablum min al-nas*. Semangat

perikemanusiaan itu memancar dalam berbagai bentuk hubungan pergaulan manusia yang penuh budi luhur. Dalam sebuah hadits ditgaskan, bahwa inti sari tugas suci beliau adalah untuk "menyempurnakan berbagai keluhuran budi (akhlak)". Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah masyarakat berperadaban, masyarakat madani, atau istilah lainnya "*civil society*".

Salah satu prinsip penting pengembangan masyarakat madani adalah tegaknya keadilan. Keadilan harus ditegakkan, tanpa memandang siapa yang akan terkena akibatnya. Keadilan juga harus ditegakkan, bahkan terhadap orang yang membenci kita pun, kita harus tetap berlaku adil, meskipun sepintas lalu keadilan itu akan merugikan kita sendiri.

Selain itu, masyarakat madani juga tidak akan terwujud jika tidak ada semangat keterbukaan dalam masyarakat. Di dalam masyarakat madani, setiap permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah. Musyawarah pada hakikatnya tak lain adalah interaksi positif berbagai individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat, dan saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu.

### **Hadirin yang berbahagia,**

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk

menyampaikan pidato kunci ini, dengan banyak keterbatasan yang saya miliki. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi segala upaya perubahan menuju masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur, ber ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum saya akhiri sambutan saya ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa pantun:

Demokrasi Indonesia semakin baik,  
Menunjukkan kecerdasan seluruh rakyat,  
Marilah kita senantiasa menjaga nama baik,  
Agar dapat diteladani seluruh rakyat.

Sungguh mulia para pendiri bangsa,  
Yang telah melahirkan Pancasila,  
Marilah kita contoh akhlak mereka,  
Mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokaatuh**

Jakarta, 17 Desember 2011

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H. Marzuki Alie**